



Humaira Azzahra

Kesultanan Aceh di Mata Turki Utsmani Abad XIX: Kajian Atas Naskah Diplomatik Abdurrahman Az-Zahir

Abstract: The relationship between the Aceh Sultanate and Ottoman in the 19th century was motivated by European colonialization. In a threatened state of sovereignty, the Aceh Sultanate mobilized international forces by sending envoys to its allies to establish diplomacy, one of which was to Ottoman. In 1873, Abdurrahman az-Zahir was sent to Ottoman Turkey as a representative of the Aceh Sultanate to ask for support. There is a letter written by him regarding Aceh's request to become a vassal state of Ottoman. This study examines the contents of Abdurrahman az-Zahir's letter as part of the diplomatic letters of the Aceh Sultanate to Ottoman in the 19th century. The letter is currently stored at the Turkish Archives with the code BOA, A. MKT.MHM. 457/55 and no manuscript copy was found. The aims of this study is to reveal the status of the Aceh Sultanate in its relationship with Ottoman in the 19th century. The result of the study shows that the relationship between the Aceh Sultanate and Ottoman in that century was a relationship between two equal countries. The Aceh Sultanate was not a vassal state of Ottoman.

Keywords: Aceh Sultanate, Ottoman, Diplomatic Letters, Vassal Status.

Abstrak: Hubungan Kesultanan Aceh dengan Turki Utsmani pada abad 19 dilatarbelakangi oleh kolonialisasi yang digencarkan Eropa. Dalam kondisi kedaulatan yang terancam, Kesultanan Aceh menggalang kekuatan internasional dengan cara mengirim utusan ke negara-negara sahabat untuk menjalin diplomasi, salah satunya ke Turki Utsmani. Pada tahun 1873, Abdurrahman az-Zahir diutus ke Turki Utsmani sebagai perwakilan Kesultanan Aceh untuk meminta sokongan. Terdapat sepucuk surat yang ditulis olehnya berkenaan dengan permintaan Aceh untuk menjadi negara vasal Turki Utsmani. Penelitian ini mengkaji isi naskah surat Abdurrahman az-Zahir sebagai bagian dari surat diplomatik Kesultanan Aceh ke Turki Utsmani pada abad 19. Surat tersebut kini tersimpan di Badan Arsip Turki dengan kode BOA, A. MKT.MHM. 457/55 dan tidak ditemukan adanya salinan naskah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap relasi Kesultanan Aceh dengan Turki Utsmani pada abad 19. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Kesultanan Aceh dengan Turki Utsmani pada abad tersebut merupakan hubungan persahabatan dua negara yang setara. Kesultanan Aceh bukan merupakan negara vasal (pengikut) dari Turki Utsmani.

Kata Kunci: Kesultanan Aceh, Turki Utsmani, Surat Diplomatik, Status Vasal..

Sejarah mencatat hubungan Kesultanan Aceh dan Turki Utsmani¹ telah terjalin sejak abad ke 16 dan terus berlanjut hingga abad 19. Hubungan tersebut menjadi akar hubungan diplomatik antara Turki dan Indonesia di kemudian hari (Terzi, dkk., 2017,31). Bukti jejak Turki Utsmani di tanah Aceh yang hingga saat ini dapat ditemukan di daerah Bitay, Aceh Besar, yaitu pemakaman orang Turki yang merupakan bekas pasukan Turki Utsmani pada masa Kesultanan Aceh Darussalam. Selain itu, terdapat bukti tertulis hubungan Aceh-Turki Utsmani berupa dokumen korespondensi kedua kesultanan yang kini tersimpan di Badan Arsip Turki. Sebagai aktor utama, benda-benda bersejarah Aceh dan Turki Utsmani yang dapat dijumpai di Aceh terbilang sangat terbatas. Hal ini dikarenakan pada saat konflik Aceh-Belanda meletus, sebagian besar peninggalan sejarah yang berharga milik Aceh dibawa oleh Belanda ke negaranya.

Belakangan, isu hubungan sejarah kedua entitas kerajaan Islam ini kembali menghangat. Sorotan terhadap kajian sejarah Aceh dan Turki kian menggeliat, terutama terkait status hubungan kedua negara. Hal ini mendapat perhatian para sejarawan Indonesia, salah satunya Azyumardi Azra. Menurutnya, hubungan Kesultanan Aceh dengan Turki Utsmani hanya bersifat diplomatik antarkesultanan, bukan antara negara vasal dan negara protektoratnya (“Wawancara Islamina” 2020a). Hal serupa disampaikan oleh Fathurahman dengan dibuktikan oleh tidak ditemukannya dokumen apapun yang dapat dijadikan landasan bahwa Kesultanan Aceh adalah negara vasal Turki Utsmani (“Wawancara Islamina” 2020b).

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Farid Wajdi Ibrahim (2020) meyakini adanya hubungan Aceh dengan

1 Makna “Turki Utsmani” dalam penelitian ini merujuk kepada kata “Ottoman” yang digunakan oleh Mehmet Özay, yaitu sebuah wilayah kekuasaan yang tidak hanya terbatas pada negara Turki saja, tetapi mencakup beberapa negara dalam rentang waktu pemerintahan berabad-abad. Beberapa peneliti ada yang menyebutnya Dinasti Utsmani, Kekaisaran Turki Utsmani, Kesultanan Utsmaniyah, dan Kekhalifahan Utsmaniyah.

kekhilafahan. Dakwah Islam memiliki pengaruh signifikan bagi masyarakat Aceh disebabkan oleh adanya hubungan ini. Hal serupa diungkapkan oleh Misri A. Muchsin (2020) yang menyatakan bahwa Aceh pernah berada di bawah naungan Turki Utsmani. Terdapat data-data sejarah yang bisa membuktikannya. Meski demikian, Misri tidak melengkapi pernyataannya dengan data sejarah secara terperinci.

Kajian literatur terhadap hubungan antara Kesultanan Aceh dan Turki mendapat sorotan di kalangan peneliti mancanegara. Penelitian terdahulu menunjukkan adanya 72 arsip yang berkaitan dengan hubungan Turki dan Indonesia tersimpan di Istanbul hingga saat ini. Sebagian besar arsip tersebut menitikberatkan pada hubungan Turki Utsmani-Aceh, termasuk salah satunya adalah bukti bahwa Sultan Abdul Majid telah mengabdikan status vasal yang diajukan Aceh dengan dikirimnya surat keputusan dan sebuah pedang. Fakta bahwa Aceh merupakan negara vasal dari Turki Utsmani ditegaskan oleh Turki Utsmani melalui sebuah surat yang ditujukan kepada pihak Belanda tanggal 8 September 1873 (Terzi, et.al. 2017, 62-66). Hal tersebut terekam dalam tulisan Mehmet Akif Terzi, dkk., berjudul Turki Utsmani-Indonesia; Relasi dan Korespondensi Berdasarkan Dokumen Turki Utsmani.

Baiquni Hasbi (2014, 95) dan Anthony Reid (2014a, 225) turut mengakui status Aceh sebagai negara vasal Turki Utsmani. Menurut keduanya, berbagai bantuan dari Turki Utsmani untuk Aceh merupakan hal yang lumrah layaknya sebuah negara penguasa membantu negara vasalnya. Sebagai timbal balik, Snouck Hurgronje menyebut Aceh memiliki kewajiban mengirim upeti secara berkala kepada Sultan Turki Utsmani. Pengiriman upeti ini adalah bentuk pengakuan Aceh terhadap kehadiran sang Sultan sebagai pemimpin mereka (Özay 2014, 22). Adanya bantuan yang diberikan untuk Aceh tidak dapat dikatakan sebatas solidaritas keagamaan saja, namun Turki Utsmani juga memiliki kepentingan politik dan ekonomi atas Aceh (Zuboidi, 2018, 125).

Bertolak belakang dengan pernyataan tersebut, Mehmet Özay (Usman, 2018, 42) dan Ermy Azziaty Rozali (2014, 97) mengutarakan bahwa hubungan Aceh dan Turki Utsmani bukanlah hubungan superior-inferior, namun merupakan hubungan kesetaraan yang saling menguatkan. Hubungan kedua negara yang terdokumentasi dalam sumber Turki hanya sebatas solidaritas keagamaan, tidak bermakna politis (Göksoy 2011, 79).

Jika kita menelusuri sejarah Kesultanan Aceh-Turki Utsmani pada abad 19, terdapat sebuah nama yang berperan penting dalam jalinan hubungan tersebut, yaitu Abdurrahman az-Zahir. Dalam kaitannya dengan hubungan Kesultanan Aceh-Turki Utsmani, az-Zahir tidak hanya berperan sebagai utusan yang membawa surat diplomatik Aceh untuk Turki, tetapi juga Menteri Luar Negeri yang turut melakukan diplomasi internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan Aceh. Abdurrahman az-Zahir tercatat melakukan perjalanan dua kali ke Turki Utsmani. Keberangkatan yang pertama ke Mekkah (saat itu berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani) terjadi pada tahun 1868. Keberangkatan yang kedua ke Mekkah terjadi pada tahun 1873.

Penelitian terhadap surat Abdurrahman az-Zahir untuk Turki Utsmani memiliki signifikansi membendung perdebatan mengenai relasi antara Turki Utsmani dengan Kesultanan Aceh. Meskipun telah banyak penelitian sejarah mengenai hal ini, terdapat sejumlah pertanyaan yang masih belum menemukan jawaban valid, di antaranya seperti (1) Apakah Aceh merupakan negara vasal Turki Utsmani, (2) Apa latar belakang penolakan Turki Utsmani atas permintaan Aceh untuk menjadikannya negara vasal Turki Utsmani pada abad 19, dan (3) Apakah Aceh selalu berada pada posisi “meminta bantuan” dalam hubungannya dengan Turki Utsmani? Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperjelas sejumlah realitas sejarah hubungan Aceh dan Turki Utsmani yang selama ini masih menimbulkan polemik melalui studi terhadap surat-surat diplomasi keduanya. Dengan demikian,

permasalahan yang diperdebatkan para peneliti – khususnya mengenai status relasi antara Kesultanan Aceh dengan Turki Utsmani – dapat dibuktikan secara ilmiah.

Penelitian ini menggunakan kajian filologi sebagai sebuah metode untuk mengungkapkan isi dari masing-masing surat. Beberapa langkah kerja yang dilakukan meliputi pemilihan judul teks, inventarisasi naskah, deskripsi naskah, suntingan teks, dan analisis isi (Fathurahman, 2015a, 108). Dalam rangka melahirkan ‘Filologi Plus’, penelitian ini tidak hanya berhenti pada penyajian teks dasar siap baca, namun juga menyajikan kontekstualisasi teks naskah yang dikaji secara kritis (Fathurahman 2017, 106).

Dalam ranah filologi, naskah surat kerajaan memiliki komponen yang lebih kompleks dibandingkan naskah-naskah pada umumnya. Keunikan naskah surat kerajaan terlihat dari adanya sudut pandang personal dan politis yang hadir secara bersamaan dalam sebuah teks yang sama. Kedua unsur ini saling terikat demi tersampainya maksud dari pengirim surat. Oleh sebab itu, naskah surat kerajaan dapat dijadikan sumber utama sejarah kerajaan yang bersangkutan (Lestari dan Kramadibrata 2022, 38).

Deskripsi Naskah Surat Abdurrahman az-Zahir

Secara garis besar, surat Abdurrahman az-Zahir berisi penjelasan lebih rinci wujud proteksi yang bisa diberikan oleh Turki Utsmani untuk membantu Aceh. Hal ini dapat ditunjukkan dengan mengirimkan utusan dengan kapal serta sebilah pedang untuk melindungi Aceh dari ancaman kekuatan asing. Selain itu, az-Zahir juga semacam memberi syarat/tanda yang bisa digunakan oleh Turki Utsmani jika bersedia menjadi negara protektorat atas Aceh. Tanda yang dimaksud adalah menganggarkan gaji bulanan dengan nominal tertentu kepada para petinggi Aceh sesuai dengan jabatannya.

Naskah berbahasa Arab ini terdiri dari 21 baris dan 1 halaman, diawali dengan kalimat الحمد لله عن شأنه yang berarti

“Segala puji bagi Allah dengan segala kesibukannya (dalam mengurus makhluk-Nya)”. Pada bagian paling atas naskah terdapat kalimat berbahasa Turki Utsmani yang ditulis secara vertikal دولتو سيادتلو افندم حضرتلري yang dalam bahasa latin berbunyi *Devletlu, Siyadatlu, Afandim Hadratleri*. Arti dari kalimat ini adalah “pemilik negara, pemilik kekuasaan, hormat kami ke hadirat Tuan”. Penempatan tulisan secara vertikal ini tampaknya mengikuti tata cara penulisan surat resmi pada masa Sultan Ibrahim Mansur Syah yang ditujukan kepada Turki Utsmani.²

Di dalam naskah ini tidak ditemukan adanya penanggalan. Tanda pengenal pengirim surat tertulis pada bagian akhir naskah, dengan catatan sebagai berikut:

الداعي العبد الحقير عبد الرحمن ابن محمد الزاهر باعلوي

“Pemohon adalah hamba yang hina, Abdurrahman Ibn Muhammad az-Zahir Ba’alawi”.

Di bawah tanda pengenal pengirim terdapat sebuah cap berbentuk lingkaran. Di dalamnya tertulis kalimat berbahasa Arab berbunyi:

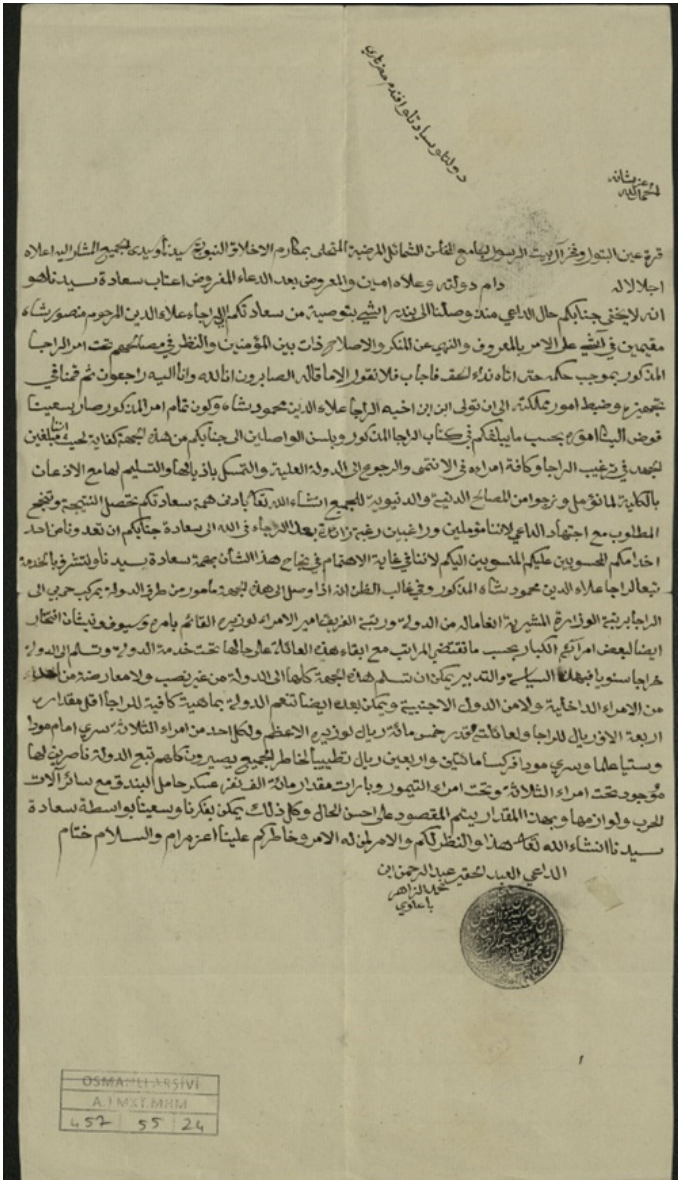
صحح من لا ياء من من مكر الله ولا يس من رحمت الله عبده
الواثق بمولا ه القادر القوي عبد الرحمن بن محمد الزاهر باعلوي

“Seseorang yang tidak terhindar dari kehendak Allah namun tidak berputus asa terhadap rahmat-Nya telah membenarkan [surat ini]. Hamba-Nya yang percaya kepada perlindungan-Nya, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Perkasa, Abdurrahman bin Muhammad az-Zahir Ba’Alawi”.

Dari tanda pengenal tersebut dapat dipastikan bahwa surat ditulis langsung oleh Abdurrahman az-Zahir yang pada masa itu berposisi sebagai perwakilan dari Kesultanan Aceh. Di bagian akhir naskah, az-Zahir menonjolkan marga garis keturunan Arabnya yang tertera setelah nama lengkapnya, yaitu Ba’alawi.

2 B.O.A, I.HR 73/3511

Hal ini dapat diartikan bahwa az-Zahir menggunakan garis keturunan sebagai salah satu kekuatannya dalam menarik perhatian negara asing, dalam hal ini Turki Utsmani.



Gambar 1. Surat Abdurrahman az-Zahir B.O.A, İ.HR 73/3511
Sumber: Badan Arsip Turki (2020).

Adapun terjemahan dari surat dengan kode B.O.A, I.HR 73/3511 adalah sebagai berikut:

Penyejuk mata nan suci dan kebanggaan keluarga Rasul yang terhimpun dengan seluruh kebaikan budi pekerti yang di ridhai, serta yang dihiasi oleh akhlak mulia kenabian, junjungan kami, dan junjungan semua kalangan yang keagungannya diperuntukkan baginya sebab untuk lebih memuliakannya. Semoga senantiasa bertahan negaranya dan kemuliaannya, amin.

Adapun yang disampaikan setelah melantunkan doa adalah permohonan yang diucapkan di puncak keagungan Tuan kami, yaitu bahwasanya bukanlah suatu rahasia lagi peran mulia Tuan sebagai tempat para pemohon sejak kedatangan kami di pelabuhan Aceh melalui rekomendasi dari Tuan Yang Mulia kepada almarhum Raja Alauddin Mansur Syah yang menetap di Aceh dan memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan kedamaian di antara umat muslim, dan memperhatikan kebaikan mereka di bawah perintah sang raja yang terkenal dengan ketegasan hukumnya.

Sampai suatu ketika panggilan kematian mendatangi beliau, lalu beliau pulang menghadap-Nya. Maka tidaklah kami dapat berkata kecuali apa yang dikatakan oleh orang-orang yang sabar, yaitu kalimat *Inna lillahi wa inna ilaihi raajiu*n. Kemudian kami mulai mempersiapkan kepulangan beliau. Adapun urusan kerajaan telah ditetapkan bahwa tampuk kepemimpinan berlanjut pada anak dari keponakan beliau, yaitu Alauddin Mahmud Syah. Adapun kesempurnaan urusan tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Beliau mendelegasikan urusannya kepada kami sesuai dengan apa yang beliau ceritakan dalam buku Raja yang telah disebutkan dan telah sampai kepada Tuan sebagai sebuah tujuan karena kami adalah penyampai pesan sebagai upaya dalam kecintaan Raja dan seluruh pemerintahannya untuk

dapat berkembang dan kembali ke Daulah Aliyyah dan tetap berpegang pada apa yang dilakukannya dan menyerahkan diri melalui ketaatan sepenuhnya untuk apa-apa yang kami cita-citakan. Kami mengharapkan kebaikan untuk kepentingan agama maupun duniawi bagi seluruh umat, Insya Allah Ta'ala. Dengan anugerah Baginda Yang Mulia, niscaya akan memberikan sebuah hasil dan akan mendapatkan keberhasilan yang diharapkan, dan kami adalah orang yang memiliki harapan dan keinginan yang besar.

Dengan memohon pada Allah serta memohon kepada Baginda Yang Mulia agar menyiapkan untuk kami salah satu pelayanan yang dapat dijadikan tolak ukur yang berkaitan dengan Tuan, mengenai hubungan pertalian dengan Tuan, karena kami memiliki harapan besar untuk keberhasilan urusan ini dengan anugerah kebahagiaan yang ada pada sisi kami.

Kami merasa terhormat untuk melayani keinginan Raja Alauddin Mahmud Syah tersebut dan memiliki harapan besar. Jika tujuan ini tersampaikan, sebuah perintah dari pihak Daulah telah siap dengan membawa kapal perang kepada Raja dengan pangkat menteri perwira tinggi sebagai hadiah bagi Beliau dari pihak Daulah, dan pangkat panglima bagi perdana menterinya. Juga bagi beberapa kepala daerahnya yang agung sesuai dengan kebutuhan posisi bersama kekuatan keluarga ini sebagaimana fungsinya untuk melayani kerajaan, dan menyerahkan pajak tahunan kepada kerajaan.

Dengan adanya kebijakan dan rancangan ini, memungkinkan Tuan untuk mengakui seluruh bagian negeri ini ke dalam Daulah tanpa adanya kesulitan atau perlawanan dari siapapun, baik dari pemimpin dalam negeri maupun dari negara asing. Hal ini juga memungkinkan setelahnya untuk Daulah memberikan kekayaan yang cukup untuk Raja sedikitnya sekitar 4000 Riyal untuk Raja dan keluarganya, sekitar 500 Riyal untuk perdana menteri tinggi, dan untuk masing-masing tiga

kepala daerah berikut; Sri Imam Muda³, Setia Ulama⁴, dan Sri Muda Perkasa⁵, serta 240 Riyal sebagai kebaikan bagi sejumlah orang. Mereka semua akan menjadi pengikut setia Daulah serta siap mendukungnya.

Di bawah pangeran tingkat tiga, pangeran Timur dan Barat terdapat sekitar seratus ribu tentara pembawa senapan bersama dengan sejumlah alat perang dan perlengkapan lainnya. Jumlah ini telah disesuaikan dengan kondisi yang paling baik. Seluruhnya sangat mungkin untuk dilakukan oleh Tuan sesuai dengan pemikiran dan keinginan kami.

Junjungan kita, Inshaa Allah Ta'ala. Demikianlah, pandangan kami untuk Tuan. Adapun keputusan kami serahkan kepada orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan. Tanggapan Tuan atas pandangan kami sangat berharga dan menjadi doa keselamatan.

Diplomasi Kesultanan Aceh dengan Turki Utsmani

Memasuki tahun 1860, gerak negara-negara Eropa semakin gencar untuk menguasai wilayah Asia dan Timur Tengah yang sebagian besar penduduknya adalah muslim. Perancis menyerbu wilayah Turki Utsmani di perbatasan Afrika Utara. Dalam keadaan terjepit, negara-negara yang menjadi sasaran Eropa melihat kekhalifahan Islam yang bernaung dalam satu kepemimpinan mutlak dibutuhkan sebagai solusi untuk mengakhiri penjajahan di negerinya. Turki Utsmani membentuk gagasan yang dipandang dapat menyelamatkan wilayah muslim, baik yang berada di dalam kekuasaannya, maupun di luar Turki Utsmani. Maka ide pan-islamisme di bawah kepemimpinan Turki Utsmani

3 Merupakan sebutan untuk kepala 26 Mukim

4 Merupakan sebutan untuk kepala 25 Mukim

5 Merupakan sebutan untuk kepala 22 Mukim

menjadi isu hangat di tengah keterpurukan kaum muslimin (Supratman 2016, 455).

Setelah tahun 1868, usaha untuk memperbaharui relasi Kesultanan Aceh-Turki Utsmani kembali terlihat pada tahun 1873. Pada saat itu, Kesultanan Aceh dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah. Abdurrahman az-Zahir yang memegang posisi sebagai Maharaja Mudabbir Al-Mulk, atau setara dengan perdana menteri, tiba di Mekkah dengan membawa surat dari Kesultanan Aceh (Reid, 2005:129). Kunjungannya kali ini menjadi yang kedua sekaligus kunjungan terakhir sebagai perwakilan Kesultanan Aceh. Dari Aceh, az-Zahir bertolak ke Penang dan bertemu dengan seorang pemuka Aceh bernama Haji Abbas. Beliau menjadi pendamping az-Zahir dalam perjalanannya menuju Turki Utsmani.

Tidak lama setelah keberangkatan perwakilan Aceh ke Turki Utsmani, Belanda menunjukkan tanda-tanda ingin melakukan penyerangan ke wilayah Aceh. Hal ini terlihat dari terparkirnya kapal perang Citadel van Antwerpen di perairan Aceh. Surat pernyataan perang ditulis oleh Belanda pada 26 Maret 1873 dan dikirimkan kepada Sultan Aceh pada 1 April 1873. Surat ini menjadi awal pernyataan perang terbuka yang diinisiasi oleh Belanda (Hasjmy, 1976:20). Pada tanggal 5 April 1873, Belanda di bawah komando J.H.R. Kohler menyerang Aceh. Sebanyak 3.360 pasukan dikerahkan ke kawasan Pantee Ceureumen (Ahmad, et.al. 2008, 71). Namun kehadiran pasukan Belanda mampu dipukul mundur oleh pejuang Aceh. Belanda harus menelan kekalahan pada serangan pertamanya ke Aceh. Serangan ini adalah gerbang awal perang panjang antara Kesultanan Aceh dengan Belanda.

Abdurrahman az-Zahir bersama rekannya, Haji Abbas, tiba di Istanbul pada tanggal 27 April 1873. Tanggal tersebut bertepatan dengan penarikan pasukan Belanda dari tanah Aceh karena telah kalah perang. Setibanya di Istanbul, az-Zahir menunggu selama beberapa hari sebelum akhirnya mendapat kesempatan untuk menyerahkan surat kepada penguasa Turki Utsmani, Sultan Abdul Aziz. Isi dari surat tersebut diawali

dengan berita pergantian penguasa Kesultanan Aceh, yaitu mengenai wafatnya Sultan Mansur Syah, lalu diganti oleh Sultan Mahmud Syah.

Perlu diketahui bahwa pada abad 19, Sultan Aceh yang pertama kali menghidupkan kembali hubungan diplomatik Kesultanan Aceh-Turki Utsmani adalah Ibrahim Mansur Syah. Semasa Ibrahim Mansur Syah masih hidup, komunikasinya dengan penguasa Turki Utsmani terjadi pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid dan Sultan Abdul Aziz. Sedangkan setelah beliau meninggal dunia, Sultan Abdul Aziz masih memerintah Turki Utsmani dan belum pernah berkomunikasi dengan Sultan Aceh yang baru, Sultan Mahmud Syah. Maka sebagai tahap awal pengenalan antara Sultan Mahmud Syah dengan Sultan Abdul Aziz, dijelaskanlah informasi terkait kematian sultan Aceh sebelumnya serta nama sultan penggantinya di dalam surat tersebut.

Pada kalimat selanjutnya, az-Zahir mempertegas posisinya sebagai pembawa pesan dari Sultan Mahmud Syah. Sang Sultan mengutus az-Zahir ke Turki Utsmani untuk menjalankan wasiat dari Sultan sebelumnya, yaitu memperbaharui status vasal Kesultanan Aceh bagi Turki Utsmani. Sultan Mahmud Syah telah mendelegasikan seluruh urusan Aceh di Turki Utsmani kepadanya. Az-Zahir menjelaskan bahwa rakyat menaruh harapan besar pada Turki Utsmani untuk mengabulkan permohonan status vasal Kesultanan Aceh. Ia menambahkan, jika Turki Utsmani mengirimkan utusan bersama dengan sebilah pedang dan medali kepada Kesultanan Aceh, maka kekuatan asing tidak akan ada yang berani mengusik Aceh. Pengiriman utusan secara tidak langsung akan memperjelas posisi Kesultanan Aceh di hadapan kekuatan asing bahwa ia memang berada di bawah Turki Utsmani. Di sisi lain, dengan penerimaan status vasal ini, ada kemungkinan kerajaan kerabat Kesultanan Aceh lainnya akan bersedia menjadi negara vasal Turki Utsmani. Artinya, tujuan khalifah untuk menjadi pemimpin seluruh umat muslim akan terwujud dengan sendirinya.

Abdurrahman az-Zahir juga memberi tanda yang bisa digunakan Turki Utsmani sebagai simbol penerimaan atau penolakannya atas permohonan Kesultanan Aceh. Jika Turki Utsmani mengirim utusannya yang berpangkat Menteri Perwira Tinggi melalui kapal, maka Kesultanan Aceh menganggap bahwa permintaannya telah dikabulkan. Sebagai bentuk kepatuhan, Pemerintah Aceh juga bersedia untuk melayani pemerintah pusat dengan menyerahkan pajak tahunan kepadanya.

Di samping itu, az-Zahir juga memerinci pelayanan yang bisa dilakukan Turki Utsmani untuk Kesultanan Aceh, tak lain untuk memperjelas statusnya jika benar-benar telah diterima sebagai negara vasal Turki Utsmani. Az-Zahir meminta Turki Utsmani memberikan gaji kepada beberapa petinggi Kesultanan Aceh, di antaranya sebanyak 4000 riyal untuk pemimpin Aceh, 500 riyal untuk perdana menteri dan jajaran petinggi pemerintah Aceh, serta 240 riyal untuk panglima (dan mungkin untuk prajurit). Para petinggi pemerintahan yang disebut oleh az-Zahir dalam suratnya adalah Sri Imam Muda, Setia Ulama, dan Sri Muda Perkasa. Masing-masing sebutan tersebut mengarah kepada Kepala 26 Mukim, Kepala 25 Mukim dan Kepala 22 Mukim yang merupakan bagian dari jabatan pemerintahan Aceh.

Kata *mukim* berasal dari bahasa Arab yang dalam sistem pemerintahan Aceh bermakna sebuah tempat yang dihuni oleh beberapa kampung. Terdapat sebuah masjid dalam satu mukim yang dipergunakan sebagai tempat shalat Jumat dengan patokan dapat dihadiri oleh 40 orang.⁶ Beberapa mukim terhimpun di dalam sagi (sagoe) yang diberi nama sesuai dengan jumlah mukim (Hurgronje, 1985:100). Terdapat

6 Acuan 40 orang ini bersumber dari hukum Islam dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh orang Aceh. Hukum tersebut berbunyi bahwa shalat Jumat secara berjamaah baru dinyatakan sah jika sedikitnya telah dihadiri oleh 40 orang yang bermukim di wilayah tersebut (penduduk tetap). Jika jumlah jamaah yang hadir kurang dari jumlah yang telah ditetapkan, maka shalat yang dilakukan terhitung sebagai shalat Dhuhur (Hurgronje, 1906:90).

3 sagi dalam pemerintahan Aceh, yaitu 22 Mukim, 26 Mukim, dan 25 Mukim. Setiap sagi dipimpin oleh seorang kepala yang disebut juga dengan panglima sagi. Di dalam suratnya, az-Zahir juga mengabarkan bahwa Aceh memiliki 100.000 orang prajurit yang siap bergabung menjadi prajurit khalifah.

Jika memperhatikan surat-surat az-Zahir pada kunjungannya ke Turki Utsmani pada tahun 1873, terdapat banyak penekanan pada wujud penerimaan vasal yang harus ditunjukkan oleh Turki Utsmani. Tampaknya az-Zahir telah mengetahui siasat yang dilakukan Turki Utsmani dalam kunjungan pertamanya, yaitu mengakui telah menerima vasal Aceh pada rakyat Aceh, sebaliknya mengakui telah menolaknya pada pihak Belanda. Di satu sisi, keputusan ini cukup menenangkan rakyat Aceh karena merasa telah berada di bawah naungan Turki Utsmani. Namun di sisi lain, jawaban tersebut tidak terlalu menguntungkan posisi Aceh karena bagaimanapun pengakuan negara vasal tersebut dibutuhkan Aceh agar kekuatan asing tidak mengusik wilayahnya lagi. Sedangkan melalui siasat yang ditunjukkan oleh Turki Utsmani, tidak mengubah apa pun persepsi bangsa asing terhadap Aceh. Terbukti pada tahun berikutnya Belanda masih berani menuntut pulau milik Aceh.

Berkaca dari hal tersebut, pada kunjungan keduanya ini az-Zahir lebih berusaha memperjelas secara struktural dan administratif hal-hal yang perlu dilakukan oleh Turki Utsmani sebagai simbol penerimaannya. Hal itu tak lain agar Turki Utsmani benar-benar menjalankan posisinya sebagai negara protektorat atas Aceh dan begitu pun sebaliknya dengan Aceh. Dengan demikian, kekuatan asing akan mempercayai kedudukan Aceh sebagai negara vasal Turki Utsmani dan tidak berani bertindak semena-mena, termasuk Belanda.

Permintaan Aceh tiba di Istanbul pada saat kedudukan Turki Utsmani sedang dalam keadaan sangat lemah. Turki Utsmani bahkan mendapat julukan 'the sick man of Europe' atau orang yang sakit di Eropa oleh beberapa literatur asing (Çırakman, 2005:164). Turki dalam kondisi sedang mencari dukungan negara-negara Eropa, termasuk Inggris dan Belanda,

dalam pertikaiannya dengan Rusia. Tak hanya itu, Turki juga disibukkan dengan perlawanan internal dari wilayah taklukannya di Timur Tengah dan Afrika Utara (Thamrin Z and Mulyana, 2009:144). Dalam posisi demikian, Turki Utsmani tak mampu berbuat banyak untuk melindungi Aceh.

Di tengah kelemahan Turki Utsmani, misi az-Zahir mendapat dukungan cukup besar dari para jurnalis Turki. Terbukti beberapa harian Turki Utsmani menempatkan berita mengenai Kesultanan Aceh di bagian halaman depan, salah satunya surat kabar *Basiret*. Surat kabar ini dikenal aktif menyebarkan konsep pan-Islamisme di antara masyarakat Turki Utsmani dan mengecam keras pelanggaran hukum internasional oleh Belanda atas invasinya ke Aceh (Ozay, 2011:280). Surat kabar lainnya yang turut bersimpati dengan permasalahan Aceh adalah *Jawaib*. Harian berbahasa Arab ini menyuarakan hal yang sama sebagaimana *Basiret* meski terdengar lebih lunak. Surat kabar setengah resmi *La Turquie* juga terus mengemukakan argumen untuk mendukung diplomasi intervensi aktif dari Turki Utsmani dalam rangka melindungi hak-hak negara kecil.

Menanggapi permintaan dari Kesultanan Aceh yang dibawa oleh az-Zahir, Menteri Luar Negeri Turki Utsmani, Safvet Pasha meminta pendapat dari beberapa negara Eropa. Yang pertama memberi pendapat adalah Inggris. Ia menyarankan Turki Utsmani untuk tidak mengambil sikap apa pun. Menurutnya, sepanjang Turki tidak memiliki kepentingan apa pun untuk dilindungi, maka tidak perlu terlalu terlibat dalam permasalahan negara lain. Agama tidak ada sangkut pautnya dengan perang.

Pendapat selanjutnya datang dari Perancis yang juga menyarankan Turki Utsmani untuk tidak mendukung Aceh. Rusia mengeluarkan suara paling keras di antara negara Eropa lainnya. Ia menakut-nakuti Turki Utsmani bahwa keterlibatannya pada persoalan Aceh atas nama agama akan memunculkan kekuatan baru untuk membela umat Kristen di Turki Utsmani yang berakibat pada terganggunya stabilitas

keamanan negara. Dengan tegas ia bahkan meminta agar Abdurrahman az-Zahir secepat mungkin diusir dari Turki Utsmani. Setelah mendengar masukan dari berbagai negara Eropa, Menteri Luar Negeri Turki Utsmani menyampaikan keputusannya. Ia menyampaikan bahwa letak geografis Aceh yang cukup jauh sehingga tidak memungkinkan Turki untuk melakukan apa pun untuk Aceh, termasuk menjadikan Aceh sebagai negara vasal. Penolakan atas permintaan Aceh ini disampaikan pada Juni 1873.

Alih-alih menyerah, penolakan Turki Utsmani justru membuat Abdurrahman az-Zahir terus mencari sokongan. Atas bantuan Bessim Bey, az-Zahir melakukan pencarian arsip Turki untuk membuktikan bahwa Kesultanan Aceh adalah negara vasal Turki Utsmani di masa lalu. Bessim Bey adalah seorang negarawan tua yang pernah bekerja di pemerintahan pusat Turki Utsmani tahun 1850-1851. Berkat bantuannya, dokumen-dokumen yang dimaksud dapat ditemukan dan dihadirkan dalam forum pertemuan.

Terdapat dua Dekrit Kenegaraan ditemukan masing-masing berasal dari periode Sultan Selim I yang ditujukan kepada Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahar (1567) dan Sultan Abdul Majid kepada Sultan Ibrahim Mansur Syah (1852) (Reid 2014:100). Kedua arsip yang telah lama terlupakan ini berisi persetujuan Sultan Turki Utsmani mengabulkan permohonan Sultan Ibrahim Mansur Syah untuk menjadikan Aceh sebagai negara vasal Turki Utsmani.

Dokumen ini dihadirkan dalam sidang Turki Utsmani pada 13 Juni 1873 dan menciptakan tekanan di kalangan pejabat Belanda maupun Turki Utsmani. Sebaliknya, dukungan dari kelompok nasionalis semakin menguat. Akan tetapi, pada akhirnya semua itu tak cukup kuat untuk membalikkan keputusan Turki Utsmani yang pada saat itu menyebelahkan kepada negara Eropa. Kepada az-Zahir disampaikan bahwa dekrit yang ditunjukkan tersebut hanya dipandang sebagai dukungan

keagamaan tanpa ada makna politik sedikit pun.⁷ Abdurrahman az-Zahir menerima penolakan kedua kalinya dari Turki Utsmani.

Penolakan tersebut mendapat respons cukup tinggi dari rakyat Turki. Antusiasme masyarakat menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan Aceh sehingga menimbulkan tekanan pada pemerintah Turki Utsmani. Untuk meredam situasi politik, Turki Utsmani mengirim surat kepada Belanda pada tanggal 3 September 1873 yang menyatakan bahwa Aceh merupakan negara vasal Turki Utsmani (Terzi, et.al. 2017, 66). Salinan dari surat ini dikirimkan ke Kedutaan Besar negara Eropa lainnya. Maka dengan adanya surat tersebut, Turki Utsmani telah mengumumkan secara resmi kepada kekuatan asing mengenai kekuasaannya atas Kesultanan Aceh.

Kebijakan yang diambil Turki Utsmani tersebut terlihat seakan telah mengabdikan permintaan Aceh, yaitu menjadikan Aceh sebagai negara vasalnya. Namun, kehadiran surat yang mengkonfirmasi status Aceh sebagai negara vasal Turki Utsmani pada realitasnya tidak membawa dampak signifikan bagi konflik Aceh-Belanda. Surat tersebut bahkan tidak dianggap sebuah keseriusan baik oleh negara-negara Eropa maupun Aceh sendiri. Jika diperhatikan, pernyataan ini kontras dengan kalimat penolakan yang disampaikan sebelumnya oleh Turki Utsmani kepada Abdurrahman az-Zahir. Bagi negara Eropa, ini menjadi tanda besar lemahnya kekuatan Turki Utsmani serta mengkonfirmasi julukan *'the sick man of Europe'* yang

7 Beberapa peneliti meyakini bahwa pada abad 16 status Aceh merupakan negara vasal Turki Utsmani. Salah satunya adalah Giancarlo Casale. Ia menulis, "... Pada waktu yang sama, wazir agung (Sokollu Mehmed Pasha) mengirim surat lagi ke Aceh, menginformasikan negara pengikutnya di sana bahwa pemberontakan di Yaman telah ditekan dan bantuan yang telah lama ditunggu dari Istanbul akan segera datang". Tampaknya status vasal Aceh demikian diyakini juga oleh Abdurrahman az-Zahir sebelum akhirnya dibantah oleh Turki Utsmani. Bantahan tersebut terlihat dari respons Turki Utsmani yang memandang dua dekrit yang dilampirkan az-Zahir tidak lebih dari hubungan keagamaan semata (Casale 2010, 137).

disematkan padanya.

Dalam kesempatan lain, Belanda buka suara atas pernyataan Turki Utsmani mengenai status vasal Kesultanan Aceh. Menurutny, meskipun Turki Utsmani memiliki hubungan yang erat dengan Aceh, harusnya ini tidak menjadi alasan untuk merisaukan kedatangan Belanda yang memiliki niat baik di Kesultanan Aceh. Lebih jauh lagi, ia justru melihat misi az-Zahir ke Turki Utsmani sebagai sesuatu yang tidak diperlukan mengingat kebijakan Belanda yang liberal dan tidak melibatkan agama. Tanggapan hangat dari Belanda tersebut agaknya membuat Turki Utsmani dapat menarik napas lega karena berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa membahayakan relasi politik dengan Belanda, Aceh, dan negara Eropa lainnya.

Atas segala upaya yang dilakukannya untuk Aceh, Abdurrahman az-Zahir dianugerahi bintang penghargaan kelas II oleh Turki Utsmani. Pada tanggal 18 Desember 1873, az-Zahir bertolak dari Turki Utsmani dengan menumpang sebuah kapal untuk kembali ke Aceh. Bersamanya terdapat sebuah surat yang dititipkan untuk Sultan Mahmud Syah. Diketahui belakangan bahwa surat tersebut berisi ringkasan upaya-upaya yang telah dilakukan Turki Utsmani dalam membantu Aceh. Pulangnya az-Zahir ke Aceh menandakan berakhirnya misi Abdurrahman az-Zahir mencari dukungan politik dari Turki Utsmani dalam rangka menyelesaikan konflik Aceh-Belanda.

Penutup

Kesultanan Aceh pada abad 19 merupakan sebuah kerajaan yang independen, bukan negara vasal Turki Utsmani. Hubungan Kesultanan Aceh-Turki Utsmani pada abad 19 adalah hubungan persahabatan antar dua negara yang setara. Surat yang dibawa oleh Abdurrahman az-Zahir mengulang permohonan yang sama dengan surat sebelumnya pada kunjungan pertama, yaitu permintaan Kesultanan Aceh agar menjadi

wilayah vasal Turki Utsmani. Namun, tidak ada jawaban pasti dari Turki Utsmani. Hal ini mengindikasikan bahwa di satu sisi tidak bisa dikatakan sepenuhnya permintaan Aceh ditolak. Namun di sisi lain, tidak ada jawaban penerimaan yang diumumkan secara terbuka terkait status vasal Aceh. Hal inilah yang membuat Aceh terus mengulang permintaannya.

Adapun pernyataan bahwa Aceh merupakan negara vasal Turki Utsmani yang disampaikan Turki Utsmani pada 3 September 1873 kepada konsul negara-negara Eropa tidak bisa menjadi landasan bahwa Aceh benar-benar berada di bawah Turki Utsmani. Kebijakan tersebut dikeluarkan pada saat Turki Utsmani sedang dalam keadaan lemah dan terdesak oleh kalangan jurnalis dan masyarakat yang mendukung pan-Islamisme. Terbukti setelah kebijakan ini diputuskan, tidak ada upaya Turki Utsmani untuk mereformasi struktural dan administratif pemerintahan Aceh agar berada di bawah kekuasaannya.

Turki Utsmani tampaknya cenderung tidak ingin menjadi negara protektorat Aceh secara resmi. Letak geografis yang cukup jauh menjadi salah satu alasannya. Akan tetapi, ada kemungkinan bahwa Turki Utsmani ingin menggabungkan Aceh ke dalam kekuasaannya jika berada pada waktu dan situasi politik yang tepat. Dalam kondisi tekanan Eropa yang sangat besar dalam pemerintahannya, keinginan tersebut sulit terwujud. Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan Turki Utsmani tampak mengulur-ulur waktu dalam menjawab permintaan Aceh. Sayangnya, Turki Utsmani lebih dahulu runtuh pada tahun 1924 sebelum sempat mewujudkan keinginan Aceh.

Bibliografi

- Ahmad, Zakaria et.al. 2008. *Sejarah Perlawanan Aceh Terhadap Kolonialisme Dan Imperialisme*. Banda Aceh: Yayasan PeNa.
- Bakar, Aboe. 2019. *Surat-Surat Lepas Yang Berhubungan Dengan Politik Luar Negeri Kerajaan Aceh Menjelang Perang Belanda Di Aceh*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi

- dan Informasi Aceh.
- Behrend, T. E., ed. 1998. *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara; Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Casale, Giancarlo. 2010. *The Ottoman Age of Exploration*. New York: Oxford University Press.
- Çırakman, Aslı. 2005. *From the "Terror of the World" to the "Sick Man of Europe": European Images of Ottoman Empire and Society in the Sixteenth Century to the Nineteenth*. New York: Peter Lang Publishing.
- Fathurahman, Oman. 2015a. *Filologi Indonesia: Teori Dan Metode*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- . 2015b. "New Textual Evidence for Intellectual and Religious Connection Ottomans-Aceh." In *From Anatolia to Aceh: Ottomans, Turks, and Southeast Asia*, edited by A.C.S. Peacock and Annabel Teh Gallop. London: Oxford University Press.
- . 2017. "Manassa: Penghubung Dua Tradisi Keilmuan." In *Dinamika Pernaskahan Nusantara*, edited by Mu'jizah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gallop, Annabel Teh. 2019. *Malay Seals from the Islamic World of Southeast Asia*. Singapore: National University of Singapore Press.
- Göksoy, İsmail Hakkı. 2011. "Ottoman-Aceh Relations as Documented in Turkish Sources." In *Mapping the Acehnese Past*. Leiden: KITLV Press.
- Hasbi, Baiquni. 2014. *Relasi Kerajaan Aceh Darussalam Dan Kerajaan Utsmani*. Banda Aceh: Lembaga Studi Agama dan Masyarakat Aceh - LSAMA.
- Hasjmy, A. 1976. *Peranan Islam Dalam Perang Aceh Dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Hurgronje, Snouck. 1906. *The Acehnese*. Jilid 1. Leiden: Brill.
- . 1985. *Aceh Di Mata Kolonialis*. Jilid 1. Jakarta: Yayasan Soko Guru.
- Lestari, Khopipah Indah, and Dewaki Kramadibrata. 2022.

- “Dinamika Hubungan Pemerintah Kolonial Belanda Dengan Raja-Raja Badung-Bali Berdasarkan Naskah Surat Perjanjian ML. 487.” *Manuskripta* 12 (1): 37.
- Özay, Mehmet. 2011. “The Sultanate of Aceh Darussalam As A Constructive Power.” *International Journal of Humanities and Social Science* 1 (11): 1–17.
- Özay, Mehmet. 2014. *Kesultanan Aceh Dan Turki: Antara Fakta Dan Legenda*. Selangor: Pusat Kebudayaan Aceh dan Turki – PuKAT.
- Reid, Anthony. 1967. “Nineteenth Century Pan-Islam in Indonesia and Malaysia.” *The Journal of Asian Studies* 26 (2): 267–83. <https://doi.org/10.2307/2051930>.
- . 1969. “Indonesian Diplomacy: A Documentary Study of Atjehnese Foreign Policy in The Reign of Sultan Mahmud, 1870-1874.” *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* 42 (2): 74–114.
- . 2005. *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad Ke-19*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- . 2014a. *Menuju Sejarah Sumatra; Antara Indonesia Dan Dunia. Wacana - Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya*. Vol. 14. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-Jakarta.
- . 2014b. “Turkey as Aceh’s Alternative Imperium” 87. <https://doi.org/10.3406/arch.2014.4458>.
- . 2017. *The Contest for North Sumatra; Atjeh, The Netherlands and Britain, 1858- 1898*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Rozali, Ermy Azziaty. 2014. “Aceh-Ottoman Relation in Bustan Al-Salatin.” *Mediterranean Journal of Social Sciences* 5 (29): 93–100. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n29p93>.
- Said, Mohammad. 1981. *Aceh Sepanjang Abad*. Jilid 1. Medan: Harian WASPADA.
- Supratman, Frial Ramadhan. 2016. “Before the Ethical Policy: The Ottoman State, Pan-Islamism, and Modernisation in Indonesia 1898-1901.” *Al-Jami’ah* 54 (2): 447–75.
- Terzi, et.al. Mehmet Akif. 2017. *Turki Utsmani-Indonesia;*

- Relasi Dan Korespondensi Berdasarkan Dokumen Turki Utsmani*. Istanbul: Hitay Holdings Company.
- Thamrin Z, H.M., and Edy Mulyana. 2009. *Dua Orang Asing Di Sekitar Istana: Panglima Tibang Dan Habib Abdurrahman Di Panggung Sejarah Aceh*. Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Usman, Ariful. 2018. "Hubungan Aceh Dari Masa Ke Masa." *Majalah Sicupak*, 2018.
- "Wawancara Islamina." 2020a. 25 Agustus 2020. <https://youtu.be/IeGrIjaRK8c>.
- . "Wawancara Islamina." 2020b. 7 September 2020. https://youtu.be/_fA40p6IWBo.
- "Webinar Menakar Sejarah Islam Di Nusantara: Tinjauan Multiperspektif dan Objektif." 29 Agustus 2020 Pukul 8.00 WIB.
- "Webinar Professor Bicara Khilafah; Jejak Khilafah Di Nusantara." 20 September 2020 Pukul 8.30 WIB.
- Zuboidi, Hayatullah. 2018. "Kepentingan Utsmani Menjalin Hubungan Dengan Kerajaan Aceh Darussalam." *Jurnal Peurawi* 1 (2): 1–9.

Humaira Azzahra, *Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Indonesia. Email: zahrahumaira23@gmail.com.